

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang di mana penduduk Indonesia sebagian besar hidup di daerah pedesaan sehingga jika pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kawasan pedesaan mendapat prioritas sebagai bidang garapan pembangunan. Kata “kemiskinan” biasanya diidentikan dengan kawasan pedesaan. Nyatanya kemiskinan sangat akrab dengan masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Pada umumnya masyarakat kawasan pedesaan hidup dalam kemiskinan, keterbatasan, dan ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi. Di samping disebabkan oleh masalah ekonomi ketidakberdayaan masyarakat pedesaan juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh informasi, kemampuan dan keterampilan masyarakat.¹

Kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolute (hasil pendapatannya dibawah garis kemiskinan), kemiskinan relatif (pendapatannya sudah terpenuhi namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya), dan kemiskinan kultural (berkaitan dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki taraf kehidupannya.²

¹ Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Affset, 2009), h. 148-149.

² Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, *Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2011*, (Jakarta: Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2011), h. 18-19

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 42 tahun 2010, tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kota, dalam implementasinya pemerintah memiliki komitmen dalam penanganan kemiskinan dengan tujuan meningkatkan kerjasama, dukungan dan sinergi semua pihak, baik sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha menanggulangi kemiskinan.³

Bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan maret 2020 lalu, kita dapat mengetahui bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,42 juta orang (9,78 persen), jumlah tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 1,63 juta orang dibandingkan dengan bulan September 2019 lalu yang mencapai 24,78 juta orang (9,22 persen).⁴ Kurangnya keterampilan sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab kemiskinan terjadi.

Kemiskinan mempunyai dampak negatif yang bersifat menyebar (*multipler effect*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh, karena persoalan kemiskinan bukan semata-mata mempengaruhi ketahanan ekonomi yang ditampilkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, melainkan pula mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan nasional, dampak dari kemiskinan juga bisa menjadi muara bagi permasalahan sosial lainnya, misalnya masalah anak jalanan, kekerasan dalam rumah tangga, perlakuan salah terhadap anak (*child abuse*), rumah kumuh, kejahatan, alkoholisme, kebodohan, dan pengangguran.⁵ Untuk itu diperlukannya suatu upaya untuk perubahan atau peningkatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2010, *Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota*, (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010)

⁴ <https://www.bps.go.id/site/resultTab> diakses pada tanggal 16 Februari 2021 pukul 00.30.

⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 142-143

agar bisa meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat guna melepaskan rakyat dari permasalahan kemiskinan.

Pemberdayaan artinya sebuah upaya untuk menghasilkan perubahan sosial, Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS: Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia.⁶

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa umat manusia diwajibkan untuk berusaha dan berupaya untuk mencapai suatu perubahan dalam kehidupannya, upaya dari perubahan itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.⁷ Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai sebuah proses perubahan yang memberi posisi ataupun kedudukan kepada manusia sebagai pelaku perubahan, baik manusia sebagai totalitas (personal) maupun sebagai bagian dari komunitas (komunal). Penggunaan kata *qowm* pada ayat itu menunjukkan bahwa proses perubahan disitu bukan perubahan personal, melainkan perubahan secara komunal yang menuju pada gerakan sosial serta sanggup menggerakkan masyarakat menuju sebuah tata nilai yang sempurna.⁸

⁶ QS: Ar-Ra'd ayat 11

⁷ Tomi Hendra "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an", Hikmah Vol. XI, NO 02, (Desember, 2017), 31

⁸ M. Quraish Shihab, "Membumikan Al-Qur'an; Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat, (Bandung: 1995) h. 242

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang secara swadaya mengelola sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan keluarganya. Dalam kegiatan ekonomi ada istilah kegiatan memproduksi dan mengkonsumsi baik itu barang maupun jasa harus membuat pilihan. Tujuannya adalah supaya bisa mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat dan sumberdaya yang ada dapat digunakan secara efisien oleh masyarakat.⁹

Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Usaha Ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat bertujuan pemberian bantuan stimulan untuk menunjang masyarakat yang kurang beruntung. Untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.¹⁰ Hal ini dilakukan dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk membantu permodalan kegiatan usahanya.

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem pemberdayaan yang berpihak pada kepentingan rakyat, sedangkan ekonomi rakyat adalah sektor ekonomi yang ditangani dan dikerjakan oleh rakyat. Berkaitan dengan tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Dalam mewujudkan hal itu salah satu bentuk usaha yang tepat sebagai representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional adalah badan usaha dalam bentuk koperasi.¹¹

Koperasi, termasuk koperasi jasa keuangan simpan pinjam merupakan salah satu bentuk kebijakan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada awalnya koperasi

⁹ Sukirno Sadono. *Miro Ekonomi Teori Penantar*. PT. Raja Grafindo. Jakarta 2005, hal 7

¹⁰ Iin Sarinah, Aan Anwar Shihabudin, Erlan Suwarlan. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pengandaran Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pengandaran", *Jurnal Moderat* vol 5 hal 268

¹¹ Muslimin Nasution. *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi*, PIP Publishing

adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai ekonomi tingkat bawah, yang dimana mereka sama-sama berkeinginan atau mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui koperasi. Hal ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota menjadi tujuan utama koperasi. Dengan demikian dapat dilihat keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggota akan lebih terukur, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi.¹²

Menyadari bahwa proses pemberdayaan masyarakat bisa terwujud melalui salah satu organisasi yaitu koperasi. Terdapat di salah satu daerah tepatnya di Kecamatan Kapetakan ada sebuah koperasi simpan pinjam unit pengelola kegiatan (UPK) Kapetakan. Koperasi simpan pinjam ini menjadi pilihan untuk melihat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kapetakan. Kecamatan Kapetakan merupakan satu dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon yang mempunyai jarak 41.00 km dari kota kabupaten. Kecamatan kapetakan terdiri dari 9 Desa, salah satunya Desa Pegagan Lor. Pemerintah Kecamatan Kapetakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya pemerintah membentuk koperasi simpan pinjam UPK Kapetakan dengan tujuan agar masyarakat bisa meminjam dan menyimpan uang di koperasi agar memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya serta memperbaiki kondisi sosial ekonominya dengan mendasarkan pada kemampuan sendiri.

Koperasi simpan pinjam UPK Kapetakan adalah lembaga keuangan yang berada di Kecamatan Kapetakan yang berawal dari program pemerintah yakni program pengembangan kecamatan (PPK). PPK merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan masyarakat di pedesaan. Kemudian pada tahun 2004 pemerintah mengganti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-Mpd). PNPM-Mpd adalah program untuk mempercepat

¹² Arifin Sitio dan halomoan tamba, koperasi: teori dan praktik (Jakarta: erlangga, 2001)

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan segala peraturan dan standar operasional pelaksanaannya (SOP) sama seperti program pengembangan kecamatan (PPK). Ketika berakhirnya pemerintahan SBY PNPM-Mpd berakhir, dengan siklus keuangan atau pinjaman yang masih banyak dan harus dikelola kembali untuk masing-masing kelompok atau simpanan masyarakat. Maka kementerian dalam negeri memberikan alternatif pilihan badan hukum meliputi yayasan, perseroan terbatas (PT), dan koperasi kepada pasca program PNPM-Mpd. Kemudian pemerintah kecamatan berembuk atau bermusyawarah sepakat dengan semua anggota-anggota dengan membentuk salah satu badan hukum yaitu koperasi yang diberi nama Koperasi Simpan Pinjam UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dan ditambahi nama Kapetakan karena berada di Kecamatan Kapetakan.

Koperasi simpan pinjam UPK Kapetakan banyak diminati oleh masyarakat Kecamatan Kapetakan. Dari 9 Desa yang ada di Kecamatan kapetakan tercatat ada 37 jumlah kelompok peminjam dan masing-masing kelompok berjumlah 10-20 anggota koperasi. Dari jumlah kelompok peminjam yang ada di Kecamatan Kapetakan, Desa Pegagan Lor memiliki jumlah peminjam yang paling banyak. Jumlah kelompok peminjam mencapai 14 kelompok, jumlah ini paling banyak diantara jumlah kelompok peminjam yang ada di Desa lainnya.

Masyarakat Desa Pegagan lor paling banyak nasabah/anggota yang menggunakan jasa layanan program simpan pinjam yang ada di koperasi simpan pinjam UPK Kapetakan khususnya para pedagang. Karena bagi para anggota yang usahanya meliputi perdagangan tambahan modal itu penting untuk kelangsungan usaha mereka dan tidak sedikit juga yang memanfaatkan dana simpan pinjam digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk kebutuhan membayar sekolah anak¹³. Menurut masyarakat Desa Pegagan Lor yang menjadi anggota koperasi dengan adanya koperasi simpan pinjam ini bisa membantu masyarakat. Karna proses yang mudah untuk

¹³ Wawancara dengan wayadi selaku ketua pengurus koperasi

meminjam hanya dengan memberikan identitas diri dan bunga yang tidak terlalu besar ketimbang meminjam di bank keliling.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program simpan pinjam dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Koperasi UPK Kapetakan. Setelah kita mengetahui bagaimana proses dari pemberdayaan tersebut kita akan mengetahui bagaimana dampak kepada masyarakat dari program simpan pinjam, kemudian muncul setelah mengetahui proses dan dampaknya bagi masyarakat, apa saja faktor pendukung dan penghambat koperasi UPK Kapetakan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Pegagan Lor. Sehingga penulis ingin mengadakan penelitian dengan fokus temanya ialah **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Simpan Pinjam Koperasi Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Kapetakan di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon”**.



B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Identifikasi Masalah

- a. Sebagian masyarakat Desa Pegagan Lor berprofesi sebagai pedagang/pengusaha kecil yang masih kesulitan dalam hal permodalan, sedangkan untuk meminjam di Bank Umum tidak mampu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak Bank.
- b. Masyarakat Desa Pegagan Lor juga masih ada yang menggunakan jasa bank keliling.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan berfokus pada suatu permasalahan dan menyadari keterbatasan penulis dalam pengetahuan, pengalaman, waktu, dan dana. Maka, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya sampai pada pembahasan tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Simpan Pinjam Koperasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kapetakan di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

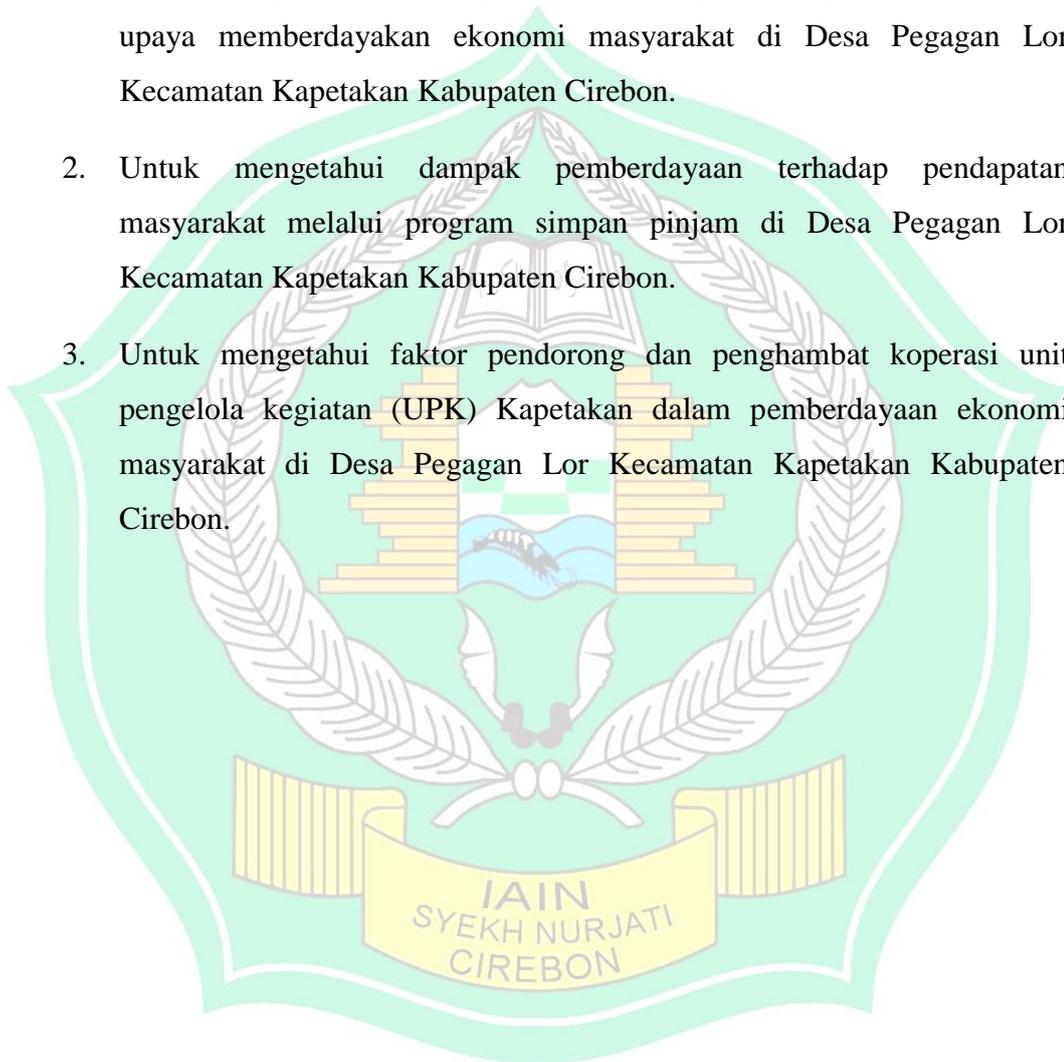
- a. Bagaimana proses pelaksanaan program simpan pinjam dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana dampak pemberdayaan terhadap pendapatan masyarakat melalui program simpan pinjam di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat koperasi unit pengelola kegiatan (UPK) Kapetakan dalam memberdayakan

ekonomi masyarakat di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program simpan pinjam dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan terhadap pendapatan masyarakat melalui program simpan pinjam di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat koperasi unit pengelola kegiatan (UPK) Kapetakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon.



D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan ini, adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang perkoperasian yang berfungsi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi koperasi unit pengelola kegiatan (UPK) Kapetakan agar lebih optimal lagi dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.



